

**POINTERS KONFERENSI PERS KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEMESTER 1 – 2021
STRATEGI PENCEGAHAN, MONITORING DAN STRANAS-PK**

Rabu, 18 Agustus 2021

PENGANTAR

- Pelaksanaan Fungsi Pencegahan, Monitoring dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) semester 1 – 2021 ini kami ingin menyampaikan keprihatinan atas situasi pandemi yang masih kita alami hingga hari ini. Bahkan bukan hanya bangsa kita, tetapi juga banyak negara di dunia. Namun demikian, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kami kepada segenap elemen bangsa yang telah bersama-sama berkontribusi agar kita keluar dari situasi pandemi.
- KPK secara aktif berupaya melakukan pencegahan korupsi pada seluruh program PC dan PEN melalui tugas pokok pencegahan, monitoring dan koordinasi. KPK ikut memberikan masukan dalam formulasi kebijakan pemberian bansos, BPUM, Bantuan Subsidi Upah, subsidi listrik untuk pelanggan 450 dan 900 watt, serta Kartu Prakerja. Di samping itu, secara aktif kami ikut memastikan program di Kementerian Kesehatan untuk sektor kesehatan seperti klaim RS yang menangani pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan, serta vaksinasi.
- Di tengah kondisi sulit ini KPK tetap bekerja dengan segala keterbatasan dan tantangan untuk memberikan kontribusi bagi negara dan masyarakat melalui 6 (enam) tugas pokok sebagaimana diatur dalam UU KPK.
- Hari ini kami akan menyampaikan kinerja KPK selama semester 1 – 2021 khususnya terkait pelaksanaan fungsi Pencegahan, Monitoring, dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Mungkin belum memenuhi semua harapan publik, tapi kami terus memacu untuk bekerja lebih baik.
- Visi KPK 2020-2024 adalah bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Hal ini dilakukan dengan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2019.
- Usaha menurunkan tingkat korupsi tidak hanya fokus pada penindakan. KPK akan mengoptimalkan pada pencegahan system, pendidikan integritas dan penindakan. Ketiga kekuatan tersebut KPK sebut dengan Trisula.
- Trisula merupakan strategi yang terdiri dari:

- Pencegahan melalui pendidikan antikorupsi; KPK focus pada meningkatkan integritas penyelenggara negara, ASN dan penegak hukum, politisi maupun pelaku usaha serta meningkatkan peran serta publik berpartisipasi memberantas korupsi sehingga Seluruh Pihak Tidak Ingin Lagi Melakukan Korupsi.
 - Pencegahan dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan menuju pengelolaan yang antikorupsi. Strategi pencegahan harus mampu meminimalisir kesempatan dan peluang serta membangun system yang tidak ramah korupsi, bahkan Memastikan Sistem Tidak Bisa Dikorupsi.
 - Penindakan yang memiliki efek jera dengan pembedaan badan dan perampasan asset milik pelaku korupsi, sehingga Penyelenggara Negara Takut Dan Tidak Mau Korupsi.
- Berdasarkan strategi tersebut, pada tahun 2021, KPK telah menentukan sasaran strategis yang terdiri pada;
 - Pencegahan sistem: Meningkatkan sistem penyelenggara pemerintah negara dan pengelolaan keuangan negara yang antikorupsi. Keberhasilan sasaran diukur melalui SPI (Survey Penilaian Integritas)
 - Pendidikan Integritas: Meningkatnya integritas penyelenggara negara. Keberhasilan sasaran akan dinilai melalui survey indeks perilaku antikorupsi (IPAK) yang dilakukan oleh BPS.
 - Penindakan yang memiliki efek jera: Meningkatnya penegakan hukum korupsi. KPK memfokuskan pada penindakan yang berefek jera dengan mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui % sentencing rate dan pada penanganan perkara melalui TPPU dan Korporasi.
 - KPK memastikan bahwa kinerja penindakan, pencegahan dan pendidikan akan saling terpadu. Setiap perkara yang terjadi dipastikan segera ditindaklanjuti oleh perbaikan sistem dan Pendidikan integritas ASN pada locus kejadian sehingga diharapkan perkara korupsi tidak berulang. Melalui resume penindakan, KPK menyusun model Pencegahan berdasarkan modus perkara, sehingga KPK antisipatif mencegah perkara yang sama terjadi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - Selain itu, efektivitas kinerja pencegahan sistem dan pendidikan integritas sangat ditentukan oleh kuantitas terjadinya perkara tindak pidana korupsi. Setiap terjadi perkara tindak pidana korupsi pada area intervensi KPK, maka akan mengurangi efektivitas kinerja Pencegahan dan pendidikan. Untuk itu, KPK membentuk benteng-benteng Pencegahan di Kementerian/Lembaga melalui pendidikan integritas pada Pimpinan lembaga dan eselon 1.
 - Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU INTEGRITAS), melalui Pembekalan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara (Executive Briefing) dan Diklat Pembangunan Integritas bagi Penyelenggara Negara.
 - Tahun 2021 KPK focus pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan.

- Untuk memastikan semua tugas dan fungsi berjalan, maka pada level internal sebagai prime mover KPK akan focus pada membentuk sumber daya manusia yang berkinerja optimal, membangun system Informasi dan data terintegrasi yang adaptif, meningkatkan efektivitas regulasi pemberantasan korupsi dan penataan Kelembagaan, serta terus berupaya meningkatkan kepercayaan public dan reputasi organisasi.
- Untuk memastikan akuntabilitas lembaga, KPK akan menyampaikan capaian per semester yang dibagi berdasarkan pelaksanaan fungsi pada pasal 6 UU 19 Tahun 2019
 - Hari ini Rabu, 18 Agustus 2021, akan dipaparkan capaian 1 semester pada Bidang Pencegahan, Monitoring dan Stranas PK (Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Stranas PK)
 - Hari Jumat, Jumat, 20 Agustus 2021, akan dipaparkan capaian 1 semester Bidang Pendidikan dan Kelembagaan (Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, dan Sekretariat Jenderal)
 - Hari Selasa, Selasa, 24 Agustus 2021, akan dipaparkan capaian 1 semester Bidang Koordinasi, Supervisi dan Penindakan (Kedeputian Korsup, Kedeputian Penindakan dan Eksekusi)

A. PENCEGAHAN DAN MONITORING

1. MONITORING

Upaya pencegahan korupsi dilakukan KPK salah satunya dengan melakukan monitoring dalam bentuk kegiatan kajian pada sistem pengelolaan administrasi negara untuk kemudian memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan adanya potensi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Rekomendasi KPK kepada Menteri Sosial pada Desember 2020 telah ditindaklanjuti dengan baik. Rekomendasi tersebut untuk penggabungan 3 basis data, yaitu data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada Ditjen PFM Kemensos, data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Ditjen Linmas Kemensos, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Pusdatin-Sekjen Kemensos. Menurut Menteri Sosial, 52,5 juta data penerima bantuan 'ditidurkan' karena terindikasi ganda (penerima menerima lebih dari satu jenis bantuan), tidak ber-NIK (kemungkinan penerima tidak ada/fiktif), serta data yang tidak dapat dijelaskan oleh pemda sebagai kontributor data penerima bantuan. Mulai saat ini, 52,5 juta penerima bantuan tidak digunakan lagi. Potensi penyelamatan keuangan negara karena dihapusnya 52,5 juta penerima tersebut bila diasumsikan menerima bantuan per penerima sebesar Rp200 ribu/ bulan, atau Rp10,5 T/bulan, maka Penyelamatan Keuangan Negara Sebesar Rp126 T/tahun

2. LHKPN

Hingga 30 Juni 2021 KPK telah menerima sebanyak 363.638 LHKPN dari total 377.574 Wajib Laporan atau tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 96,31%.

Jumlah tersebut terdiri atas 96,44% Bidang Eksekutif; 89,27% Bidang Legislatif; 98,46% Bidang Yudikatif; dan 98,15% Bidang BUMN/D.

KPK juga mencatat tingginya peran serta masyarakat dalam mengakses fitur e-announcement pada aplikasi e-LHKPN. Tercatat sebanyak 317.318 akses dalam kurun semester 1 – 2021 dengan lima kota terbesar pengakses, yaitu Jakarta (100.316), Medan (19.142), Surabaya (18.421), Makassar (13.546), dan Bandung (12.635).

Selain melakukan pendaftaran, KPK juga melakukan pemeriksaan atas LHKPN. Selama semester 1 – 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap total 175 LHKPN yang terdiri atas 92 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas permintaan internal, di antaranya terkait proses seleksi hakim agung dan pengembangan perkara. Dan, 83 LHP dari para penyelenggara negara yang meliputi kepala daerah, direksi BUMD, dan penyelenggara negara di kementerian.

3. PENCEGAHAN KORUPSI PADA BADAN USAHA

Melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, KPK mendorong peran serta sektor usaha dalam pencegahan korupsi. Sampai dengan semester 1 – 2021, KPK telah melakukan kegiatan field review dan FGD dengan Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur yang melibatkan 31 instansi dan badan usaha guna melakukan pemantauan dan pemetaan pada badan usaha khususnya pada sektor infrastruktur dan sektor pangan.

Selain itu, KPK juga melakukan kegiatan yang sama dengan 13 instansi dan badan usaha lainnya yang bergerak di sektor keuangan, migas, kehutanan, dan sektor lainnya.

4. GRATIFIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Sepanjang semester 1 – 2021, KPK juga telah menerima sebanyak 1.137 laporan gratifikasi dengan total nominal Rp6,9 Miliar.

Sebanyak 309 di antaranya dinyatakan sebagai milik negara. Sebesar Rp760 juta telah disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kepedulian KPK terhadap peningkatan kualitas layanan publik juga dilakukan dengan terus mengembangkan platform Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) sebagai medium literasi publik dan menampung keluhan masyarakat terkait pelayanan publik pada sektor pendidikan, anggaran, kesehatan, dana desa dan perizinan. Hingga 30 Juni 2021 JAGA menerima 348 keluhan terkait penyaluran bansos dan banpres produktif usaha mikro (BPUM). Keluhan yang paling banyak disampaikan terkait Bansos adalah tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar (104 keluhan), bantuan tidak dibagikan oleh aparat (52 keluhan), jumlah dana bantuan yang diterima kurang dari yang seharusnya (27 keluhan), nama di daftar penerima bantuan tidak ada atau diduga fiktif (25 keluhan), menerima lebih dari satu bantuan (6 keluhan), seharusnya tidak dapat, tapi menerima bantuan (1 keluhan).

Sedangkan, 133 keluhan lainnya terkait BPUM. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah (1) Peserta tidak menerima bantuan, meskipun sudah menerima informasi dari Bank Penyalur, tetapi

setelah dicek belum mendapatkan dananya. (2) Peserta menerima pemberitahuan mendapatkan dana BPUM, tetapi identitas atau data perbankan tidak sesuai. (3) Informasi untuk mendapatkan BPUM dan pertanyaan seputar bansos UMKM, dan (4) Dana bantuan yang sudah masuk, ditarik atau didebet kembali oleh Bank penyalur.

Upaya KPK untuk membangun portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon dan transparansi dari pemerintah serta masyarakat ini, kami bersyukur diterima dan diakui dengan meraih penghargaan sebagai Honorable Mention. Pada Maret 2021 dalam acara World Justice Challenge 2021: Advancing the Rule of Law in a Time of Crisis yang diselenggarakan WJP, dari 425 peserta yang berasal dari 114 negara terpilih 10 proyek yang diakui. JAGA merupakan salah satu dari 10 proyek yang meraih penghargaan tersebut.

B. STRANAS PK

Untuk tahun 2021-2023, Stranas PK menetapkan 12 rencana aksi. Beberapa rencana aksi menunjukkan kemajuan sebagai berikut:

1. Renaksi One map policy - Pengukuhan Kawasan Hutan

Pengukuhan kawasan hutan merupakan salah satu prasyarat utama bagi segala aktivitas kegiatan berusaha dan non berusaha di kawasan hutan, saat ini Stranas PK terus mengawal aksi Pengukuhan Kawasan Hutan sejak tahun 2019 dengan target secara nasional adalah 125, 817, 022Ha dan yang telah ditetapkan seluas 88,558, 465 Ha, masih ada 37.258,557 Ha yang belum ditetapkan sampai Desember 2020. Sampai dengan Juni 2021 baru dilakukan penetapan kawasan hutan seluas 606.526 Ha (2%) dari total 37.258.557 Ha yang harus ditetapkan di seluruh Indonesia. Atau masih ada 36,652,031 Ha yang belum ditetapkan secara nasional

2. Pemanfaatan Data NIK yang terintegrasi untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral

Stranas PK mendorong peningkatan utilisasi NIK pada pelbagai proram sektoral. Sampai dengan Semester I/2021 hasil yang sudah dicapai antara lain:

- Terintegrasinya DTKS dengan data penerima bantuan sosial (PKH, BST dan BPNT) dengan tingkat verifikasi NIK secara keseluruhan 100.662.702 dari kurang lebih 139 juta data
- Data penerima bansos (pemegang rekening/kartu) telah dipastikan padan dengan NIK. Kemensos juga telah menonaktifkan data ganda.
- Pemanfaatan data kependudukan dalam pelaksanaan vaksinasi covid 19 setelah sebelumnya menggunakan data-data dari berbagai sumber.
- 99% penerima bantuan UMKM terverifikasi padan dengan data kependudukan

3. Pemanfaatan Indonesia National Single Window – INSW untuk Sektor Pangan dan Kesehatan Perbaikan Integrasi Data Ekspor Impor pada Komoditas Pangan dan Kesehatan (INSW)

Stranas PK mendorong perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan

melalui Indonesian Nasional Single Window (INSW). Sampai dengan Semester I/2021 progress dari aksi ini antara lain:

- Sistem INSW sudah mengakomodasi pengaliran data secara elektronik oleh K/L teknis untuk 6 komoditas pangan strategis (Bawang Putih, Gula, Jagung, Beras, Daging, dan Garam), namun pengaliran data tersebut dianggap belum terstandar.
- Provisi pengaliran data dan perizinan ekspor-impor sudah dituangkan ke dalam rancangan Perpres Neraca Komoditas. Saat ini sedang menunggu pengesahannya sehingga dengan demikian akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang akurat dalam penetapan ekspor-impor komoditas pangan strategis.

4. Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis elektronik

Stranas PK dalam aksi ini mengupayakan tersedianya suatu sistem yang menjamin teragregasinya data dan informasi secara elektronik pada semua tahap siklus penganggaran, mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan/ penatausahaan hingga pelaporan atau audit. Sampai dengan Semester I/2021 capaian dari aksi ini telah disepakati Integrasi pada aplikasi KRISNA dan SAKTI melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkeu dan Bappenas pada awal Juli 2021 yang di dalamnya memuat:

- a. penyederhanaan proses bisnis Rencana Kerja K/L (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA K/L),
- b. Penguatan penyelarasan regulasi terkait Renja K/L dan RKA K/L,
- c. Pembentukan dan pengaturan proses pertukaran data perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan,
- d. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi; dan,
- e. Kerja sama lain yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

1. KPK menggunakan strategi Trisula untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Tahun 2021, sasaran Kedepuitan Pencegahan dan Monitoring adalah meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pengelolaan Keuangan negara yang antikorupsi. Perbaikan sistem Pencegahan korupsi diukur melalui Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang diukur oleh BPS. Nilai SPI ditargetkan pada TW 4, yaitu 70.
2. Selain itu, pada level kedepuitan Pencegahan dan monitoring diharapkan bekerja secara efektif dalam melakukan Pencegahan korupsi. Nilai efektivitas Pencegahan system akan dibuktikan pada nilai keberhasilan perbaikan sistem tata kelola Pencegahan korupsi pada Kementerian/Lembaga. Adanya perkara korupsi yang terjadi di Kementerian/Lembaga menjadi nilai pengurang efektivitas pencegahan korupsi. Sehingga Pencegahan dan Penindakan harus terus terpadu.

3. Keterpaduan antara Trisula menjadi sasaran strategis semua kedeputian. Implementasi trisula di KPK dilakukan dengan cara setiap terjadi perkara TPK, kedeputian penindakan akan menyusun resume perkara yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh kedeputian Pencegahan melalui perbaikan sistem pada system penyelenggaraan pemerintahan negara dan pengelolaan Keuangan negara sehingga perkara serupa dapat dicegah melalui perbaikan sistem.
4. Pencegahan focus pada perbaikan sistem tata kelola berdasarkan 5 area yaitu a. kepatuhan LHKPN, b. kepatuhan pelaporan Gratifikasi, c. implementasi rekomendasi kajian, d. implementasi manajemen anti suap dan e. implementasi aksi Stranas PK (Agregasi).
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, menetapkan focus Stranas PK terdiri dari perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. KPK sebagai bagian Timnas Stranas PK, bertugas mengoordinasikan, menyinkronisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Stranas PK.

PENUTUP

Demikian kinerja KPK sebagai wujud pelaksanaan tugas melalui strategi Pencegahan, Monitoring dan Stranas-PK selama semester I tahun 2021. Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi publik dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan semua partisipasi publik dalam upaya pencegahan korupsi.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan fokus yang kami tuju, KPK tak bisa bekerja sendirian. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik itu akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pegiat antikorupsi, para penegak hukum, seluruh kementerian/lembaga, dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus mendukung KPK dalam melakukan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi.
